



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 20 Maret 2012

Halaman: 27

Agenda Kota

Pejabat Tandatangani Perjanjian

tak Korupsi

Yulianingsih

Sebanyak 125 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dari kepala bidang hingga kepala SKPD menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan ini sebagai bentuk janji dan komitmen dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penandatanganan secara simbolis dilakukan beberapa pejabat di hadapan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Wakil Wali Kota Imam Priyono, Wakil Ketua DPRD Sinarbiyat Nujanal, disaksikan Deputi Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Ismail Mohammad.

Haryadi Suyuti dalam sambutannya mengatakan Pakta Integritas ini adalah sumpah dan komitmen untuk menjadi aparat birokrasi yang berkualitas. Jika semua point dalam

Pakta Integritas ini dicermati dan dilaksanakan pasti tidak akan ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemkot Yogyakarta. Inilah yang menjadi harapan semua pihak termasuk masyarakat.

"Kita sepakat bahwa pakta integritas ini merupakan sebuah komitmen biasa. Karena berbuat baik dan menjaga amanah adalah satu hal yang biasa sebagai bagian dari fitrah manusia untuk menjadi orang yang baik terutama dalam menjalankan tugasnya," tandasnya.

Selain Pakta Integritas, pihaknya kata dia, juga melakukan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan karena langkah itu merupakan garda depan untuk bisa melayani masyarakat, di mana substansi reformasi birokrasi ini adalah mengetahui kebutuhan masyarakat.

Masyarakat kata dia, butuh layanan dalam hal waktu yang jelas, persyaratannya jelas dan biaya yang jelas pada semua spek. Karena itulah lanjutnya, substansi dari birokrasi adalah pelayanan kepada masyarakat.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta, Titik Sulastri menjelaskan dalam reformasi birokrasi di Pemkot Yogyakarta dirancang dalam tiga pilar utama, yakni pilar I penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja. Pilar II yakni Penyempurnaan SOP dan SOP layanan unggulan, serta Pilar III yang meliputi peningkatan disiplin pegawai, *assessment center*, diklat berbasis kompetensi, pola mutasi, penataan pegawai, manajemen talenta dan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Sementara Mohammad Ismail dalam kesempatan itu mengatakan, reformasi birokrasi harus dilaksanakan untuk mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik, meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, meningkatkan mutu kebijakan, meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, menjadikan birokrasi yang antisipatif, proaktif dan efektif.

"Jika reformasi tidak berhasil maka akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas, antipati, trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik bahkan menghambat pembangunan nasional," katanya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendryanto menegaskan, pakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat Pemkot Yogyakarta sebenarnya bukanlah sesuatu yang utama. Yang paling penting menurutnya adalah pelaksanaan anti KKN secara nyata oleh PNS di dalam memberikan pelayanan publik.

"Tanda tangan seperti ini baik, tetapi yang penting bukan sekadar tanda tangan, tapi harus ada bukti nyata," tegasnya.

Menurutnya penting bagi PNS untuk mampu memberikan bentuk pelayanan prima. Kalau terjadi kasus KKN harus ada tindakan tegas melalui sanksi yang tegas bagi pelakunya.

■ eds: heri purwata

Ttd

Surat Kepada Yth. :
1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Surat Kepada Yth. :
1. Bagian Organisasi
2. Inspektorat
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Bagian Organisasi	☐ Negatif	☐ Amat Sekali
2. Inspektorat	☒ Positif	☐ Segera
3.	☐ Netral	☒ Biasa
4.		
5.		

Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005